

PENTINGNYA PENAMBAHAN MUATAN LOKAL PEMBELAJARAN SEJARAH PADA PERATURAN GUBERNUR BANTEN

THE IMPORTANCE OF ADDING LOCAL CONTENT OF HISTORY LESSON IN THE REGULATION OF BANTEN'S GOVERNOR

¹⁾Abdul Somad dan ²⁾Endan Suwandana

¹⁾SMAN 1 Ciruas, Kabupaten Serang; Jalan Raya Jakarta Km.9,5 Serang, Provinsi Banten, Indonesia

²⁾BPSDMD Provinsi Banten, Pandeglang; Jl. Raya Lintas Timur Km 4 Pandeglang, Indonesia

*Email: abdulsomad1976@gmail.com; endan2006@yahoo.com

(disubmit: 26 Oktober 2021, direvisi: 28 Januari 2022, diterima: 10 Februari 2022)

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada implementasi dan kendala pembelajaran sejarah lokal Banten di tingkat SMA di Provinsi Banten. Metodologi yang digunakan adalah melalui pendekatan kuantitatif, kualitatif dan deskriptif dengan dua instrumen yaitu kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 73% guru sejarah SMA telah melaksanakan pembelajaran sejarah lokal. Ruang lingkup sejarah lokal adalah mulai objek/fakta sejarah yang terdapat di lingkungan terdekat dengan sekolah, kabupaten/kota, hingga wilayah Provinsi Banten. Materi ajar paling dominan adalah masa Kesultanan Banten dan masa revolusi kemerdekaan. Temuan menarik lain adalah tokoh pahlawan nasional asal Banten yang baru ditetapkan pemerintah pada tahun 2018 yaitu K.H. Syam'un sebagai tokoh yang paling banyak dipelajari. Adapun kendala yang dihadapi dalam pembelajaran sejarah lokal adalah minimnya bahan ajar, media pembelajaran, dan alokasi waktu. Para responden mengharapkan Pemerintah Provinsi Banten mengeluarkan sebuah kebijakan agar sejarah lokal masuk sebagai Muatan Lokal Kurikulum 2013.

Kata Kunci: Kesultanan Banten, K.H. Syam'un, muatan lokal, Mata Pelajaran Sejarah.

ABSTRACT

This research is based on implementation and obstacles in learning local history of Banten at the high school level in Banten Province. The methodology used is quantitative, qualitative and descriptive approach with two instruments, i.e. questionnaires and interviews. The results showed that almost 73% of high school history teachers have implemented local history lessons. The scope of local history ranges from historical objects/facts found in the locations closest to schools, districts/cities, to the Banten Province area. The most dominant teaching material is the period of the Sultanate of Banten and the period of the independence revolution. The most interesting finding is the national hero from Banten who was just appointed by the government in 2018, namely K.H. Syam'un as the most studied character. The obstacles faced in learning local history are the lack of teaching materials, learning media, and time allocation. The respondents expect the Banten Provincial Government to issue a policy to make local history a Local Content of the 2013 Curriculum.

Kata Kunci: *Sultanate of Banten, K.H. Syam'un, local content, history subject*

PENDAHULUAN

Mata pelajaran sejarah masih dianggap sebagai mata pelajaran yang kurang penting, padahal mengajarkan sejarah berarti mengajarkan tentang kehidupan (Susanto, 2014). Salah satu tujuan dari pelajaran sejarah adalah untuk membangkitkan, mengembangkan, dan memelihara semangat kebangsaan. Menurut Sirnayatin (2017), pembelajaran sejarah juga sangat urgen diberikan pada generasi muda karena pelajaran sejarah dapat membangun karakter bangsa yang kuat pada generasi muda. Penelitian mengenai pelajaran sejarah sebagai muatan lokal masih sangat terbatas.

Sejauh ini penelitian terkait implementasi pembelajaran sejarah lokal di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia masih sangat terbatas. Beberapa penelitian sebelumnya pernah dilakukan di Temanggung (Purnamasari dan Wasino, 2011), Madiun (Wibowo, 2016), Tasikmalaya (Hardiana, 2017), Kudus (Amin, 2010), dan Sukorejo (Lestari dkk, 2018).

Adapun penelitian terkait pembelajaran sejarah lokal di Provinsi Banten sendiri pernah dilakukan oleh Fauzan (2018), Permana (2019), Permana dan Suhaili (2020), dan Jumardi dkk (2020). Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum menggambarkan secara keseluruhan

implementasi pembelajaran sejarah lokal di seluruh SMA di wilayah Provinsi Banten. Penelitian-penelitian tersebut hanya mengangkat di lokus sekolahnya masing-masing dan hanya bersifat tematik studi kasus lokal sejarah wilayah tertentu, yaitu Tangerang dan Cilegon.

Melalui kajian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana ruang lingkup, bahan ajar, tokoh-tokoh sejarah, kendala-kendala dan harapan-harapan terkait pembelajaran sejarah lokal yang diterapkan di seluruh SMA di Provinsi Banten. Hal ini sejalan dengan program Gubernur Banten Wahidin Halim yang melakukan revitalisasi pada beberapa pusat sejarah di Provinsi Banten. Tulisan ini bertujuan untuk menambah referensi kajian tentang implementasi pembelajaran sejarah lokal di tingkat provinsi di Indonesia. Deskripsi yang sama sebagaimana yang ditulis oleh Hardi dan Basri (2019) yang meneliti implementasi sejarah bermuatan lokal di SMA di Sumatera Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebanyak mungkin bagaimana implementasi pembelajaran sejarah lokal di sekolah masing-masing dari para guru sejarah di Provinsi Banten serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh para guru sejarah sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah. Menurut Somad (2019), pembelajaran yang dimaksud

adalah penyisipan atau pengintegrasian materi sejarah lokal pada beberapa kompetensi/materi yang ada dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia dan Sejarah Peminatan Kurikulum 2013. Dalam arti lain, peristiwa-peristiwa lokal dapat disisipkan dalam pembelajaran sejarah nasional, dengan cara mencari kesuaian tema atau pokok bahasan dalam Silabus Sejarah Nasional (Hatmono, 2021).

Motivasi penelitian ini adalah agar pembelajaran sejarah tidak lagi dianggap membosankan oleh siswa sebagaimana dinyatakan Purnamasari dan Wasino (2011) dan Siska (2015). Hal senada juga dinyatakan oleh Abidin (2020) yang berpendapat bahwa pembelajaran sejarah harus mampu memberi ruang bagi tujuan pembelajaran yang bersifat praktis. Guru sejarah menurutnya harus melakukan berbagai inovasi pembelajaran atau menggunakan asas Apa Manfaatnya Bagi Aku (AMBAK) dalam upayanya untuk melakukan kontekstualisasi pembelajaran sejarah. Selain itu, sebagaimana dinyatakan Wijayanti (2017), pembelajaran sejarah lokal dapat meningkatkan nasionalisme, kesadaran sejarah, berpikir kritis, gotong royong, dan sebagainya. Hasil akhirnya tentu munculnya manusia Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis

serta bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003.

Kajian ini dibatasi pada masalah implementasi dan kendala-kendala pembelajaran sejarah lokal di tingkat SMA di Provinsi Banten. Hal itu karena pada Kurikulum 2013 di tingkat SMA terdapat dua mata pelajaran sejarah yaitu Sejarah Indonesia dan Sejarah Peminatan yang memiliki kompetensi dan materi yang lebih lengkap dibandingkan SMK serta alokasi waktu pembelajaran yang lebih banyak, terutama di peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Oleh karena itu, penulis menduga bahwa guru-guru sejarah di SMA lebih punya kesempatan yang lebih besar dalam melaksanakan pembelajaran sejarah lokal yang diharapkan ada dalam Kurikulum 2013.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan gabungan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan deskriptif dengan menggunakan dua instrumen. Pertama, melalui kuesioner pada survei online/daring yang melibatkan 148 orang guru sejarah se- Provinsi Banten pada September 2019. Kedua, melalui wawancara pada tanggal 23 Oktober 2021 dengan dua orang guru sejarah yang berasal dari Serang dan Rangkasbitung. Sebagian besar responden sudah mengajar

lebih dari lima tahun. Responden berasal dari Kabupaten Serang 48 orang, Kabupaten Pandeglang 26 orang, Kota Tangerang 24 orang, Kabupaten Tangerang 13 orang, Kota Tangerang Selatan 11 orang, Kabupaten Lebak 9 orang, Kota Serang 9 orang, dan Kota Cilegon 8 orang. Kuesioner yang diajukan berupa pertanyaan tertutup yang menghasilkan data kuantitatif dan pertanyaan terbuka berupa pendapat atau pernyataan. Wawancara hanya sebagai data tambahan saja. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data naratif-deskriptif. Teknik analisis ini dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah dari Miles and Huberman (1992) yakni: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penafsiran.

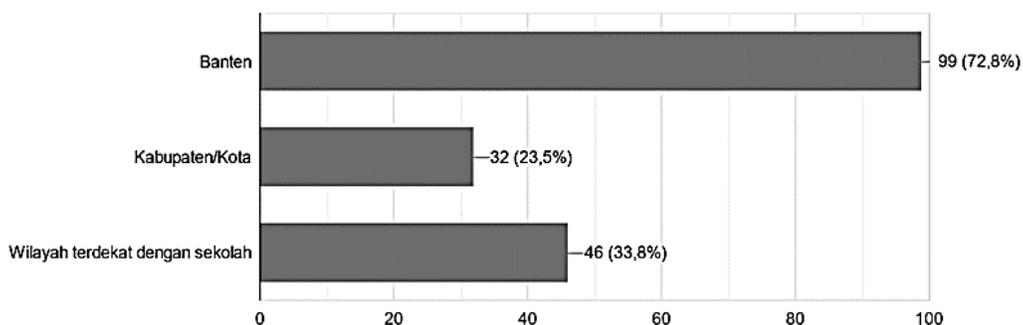
HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan paling signifikan dalam penelitian ini adalah bahwa sebagian besar

yaitu sekitar 73% responden sudah menerapkan pembelajaran sejarah lokal Banten, sisanya menyatakan belum menerapkannya. Walaupun hasil temuan penelitian ini cukup menggembirakan, namun responden menemukan adanya kesulitan dalam mencari bahan sejarah lokal yang otentik dan kesulitan dalam menyeragamkan konten materi antar sekolah. Selama ini responden berimprovisasi dengan berbagai sumber dari internet yang bisa jadi tidak semuanya benar (otentik). Adapun ruang lingkup sejarah lokal yang dipelajari yaitu wilayah Provinsi Banten, wilayah kabupaten/kota, dan wilayah yang terdekat dengan sekolah. Mengenai materi sejarah lokal yang pernah diterapkan, paling dominan adalah Masa Kesultanan Banten.

Ruang Lingkup Sejarah Lokal Banten

Dari Gambar 1 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar yaitu hampir tiga perempat



Gambar 1. Ruang lingkup sejarah lokal yang dipelajari siswa SMA di Provinsi Banten

responden menyampaikan topik sejarah lokal dalam ruang lingkup Provinsi Banten. Topik yang dimaksud di sini adalah Masa Kesultanan Banten yang tumbuh berkembang sejak abad ke-16 hingga abad ke-19. Objek sejarah yang paling banyak dikunjungi para siswa dalam kegiatan studi lapangan yaitu Kawasan Banten Lama, di mana terdapat bangunan cagar budaya peninggalan Masa Kesultanan Banten, yaitu Istana Surosowan, Masjid Agung, serta sejumlah bangunan lainnya.

Selain Kesultanan Banten, sebagian responden juga memberikan topik sejarah yang terdapat di wilayah kabupaten/kotanya dan wilayah terdekat dengan sekolahnya, jika memang terdapat objek-objek sejarah yang penting dekat dengan sekolahnya. Menurut Tati (2016), sejarah lokal adalah sejarah dalam ruang lingkup terbatas yang meliputi suatu wilayah/ daerah/lokalisasi daerah tertentu seperti desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan atau provinsi. Menurutnya, dalam konteks pembelajaran di sekolah, sejatinya materi sejarah lokal tidak dibatasi dari segi administrasi keruangan.

Dari hasil kuesioner diketahui bahwa sepertiga responden tidak hanya mengajarkan sejarah lokal dalam wilayah administratif saja, melainkan memanfaatkan wilayah terdekat dengan sekolah sebagai sumber belajar sejarah. Mereka lebih antusias mempelajari objek-

objek sejarah terdekat dibandingkan mempelajari sejarah kabupaten/kotanya sendiri. Objek itu antara lain dinyatakan oleh guru yang bertugas di Wanasalam, Lebak, yang menyampaikan tema sejarah Romusha di Banten Selatan. Beberapa orang guru di Tangerang mengajarkan materi tentang peristiwa bersejarah yang disebut Pertempuran Lengkong dengan tokohnya yang populer bernama Daan Mogot.

Sementara itu, sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Pandeglang lebih tertarik untuk mengenalkan sejumlah situs pra-aksara yang berada di sekitar Gunung Pulosari. Salah satu yang paling populer adalah Situs Citaman di Kecamatan Menes. Guru yang mengajar di SMAN 12 Pandeglang bahkan mengenalkan siswanya pada Prasasti Munjul. Sebagaimana dinyatakan BPCB Banten (2019), prasasti yang terletak ditemukan di aliran Sungai Cidanghyang, Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang ini adalah salah satu bukti Kerajaan Tarumanegara yang diduga sudah ada sejak abad ke-5.

Lain lagi dengan para guru di Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, karena lokasi sekolahnya dekat dengan Bendungan Pamarayan, para guru tergerak untuk mengenalkan situs bersejarah ini kepada siswa dalam materi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, yaitu sistem irigasi

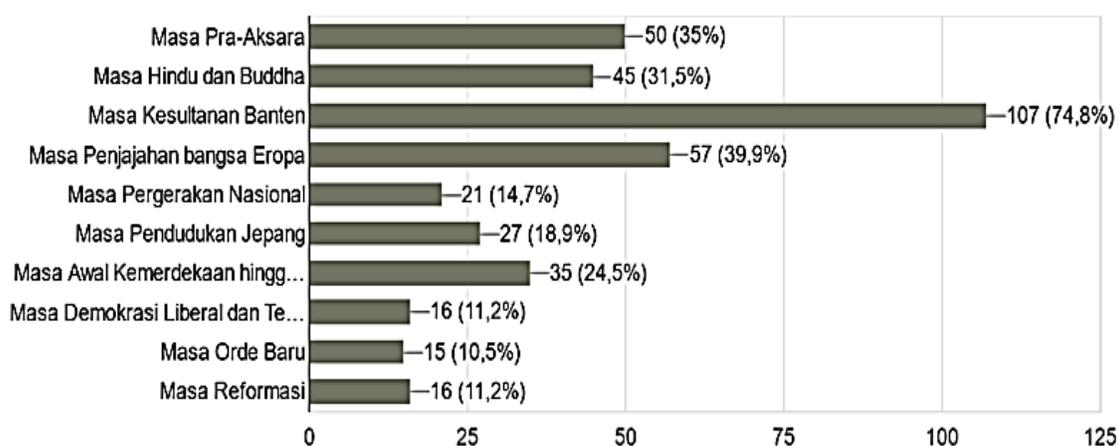
yang terstruktur. Hal yang tidak jauh berbeda dilakukan oleh guru-guru di Rangkasbitung yang berkunjung ke Museum Multatuli untuk materi yang sama.

Materi Ajar

Subjek sejarah yang diajarkan oleh para responden adalah tentang manusia, maka yang

nasional, masa pendudukan Jepang, masa kemerdekaan, masa demokrasi terpimpin, masa orde baru, hingga masa reformasi. Para responden menerapkan pembelajaran sejarah lokal hampir di setiap periodisasi sebagaimana disajikan pada Gambar 2.

Pada Gambar 2, terlihat bahwa materi yang paling dominan adalah masa Kesultanan



Gambar 2. Materi sejarah lokal Banten yang dipelajari siswa SMA di Provinsi Banten.

dibahas adalah dinamika perkembangan masyarakat lokal dalam berbagai aspeknya. Tema-tema yang dipelajari mencakup bidang yang sangat luas, antara lain politik, ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, serta periodisasi sejarah lokal yang seirama dengan periodisasi dalam sejarah Indonesia. Pada Kurikulum 2013 periodisasi yang dimaksud dimulai dari masa pra-aksara, masa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha, masa kerajaan-kerajaan Islam, masa kolonialisme, masa pergerakan

Banten. Data menunjukkan dari 148 responden, 107 orang diantaranya telah menerapkan materi ajar ini dalam pembelajaran. Selebihnya secara berturut-turut berdasarkan jawaban terbanyak adalah: Masa Penjajahan Bangsa Eropa, Masa Pra-Aksara, Masa Hindu-Buddha, Masa Awal Kemerdekaan, Masa Pendudukan Jepang, dan Masa Pergerakan Nasional. Materi yang paling sedikit diterapkan adalah Masa Demokrasi Liberal, Masa Orde Baru dan Masa Reformasi.

Mengapa Masa Kesultanan Banten dan Masa Penjajahan bangsa Eropa menduduki dua besar materi pembelajaran?. Jawaban pertanyaan ini bisa kita analisis dari Standar Isi Kurikulum 2013, terutama pada Kompetensi Dasar (KD) yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.24 Tahun 2016. Di dalam regulasi ini kita dapat menjumpai bahwa terdapat pengulangan materi atau kompetensi pada Sejarah Indonesia kelas X dan XI dan Sejarah Peminatan Kelas XI.. KD yang dimaksud adalah: pertama, Sejarah Indonesia di kelas X KD 3.8 yaitu “Menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini”; kedua, Sejarah Indonesia kelas XI KD 3.3 “Menganalisis dampak politik,, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris) dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini”; ketiga, Sejarah Peminatan kelas XI KD 3.2 “Menganalisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini”. Selain faktor ini, peneliti menduga

hal ini dimungkinkan karena materi ini sangat populer dan bersifat nasional yang bisa kita dapati di hampir semua buku teks sejarah.

Tokoh-Tokoh Sejarah

Belajar sejarah tidak terlepas dari tokoh-tokoh sejarah. Begitu pula dengan pembelajaran sejarah lokal di Banten. Siapakah tokoh yang paling banyak dikenalkan pada siswa SMA?. Meski materi Masa Kesultanan Banten lebih banyak diajarkan, tetapi Sultan Ageng Tirtayasa hanya dikenalkan oleh 21 orang guru saja. Empat besar tokoh yang paling banyak dikenalkan para guru adalah: Brigjen K.H. Syam’un (58 orang), Kyai Wasid Geger Cilegon (39 orang), Syekh Yusuf Al-Makasari (28 orang), dan Kyai Tapa-Ratu Bagus Buang (9 orang). Perlu disampaikan juga disini, beberapa tokoh lainnya yang sudah dikenalkan guru sejarah di ruang-ruang kelas, yaitu: Maulana Hasanudin, Pangeran Purbaya, Arya Wangsakara Tangerang, Mangkubumi Wargadiredja, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Asnawi Caringin, Daan Mogot, Syafrudin Prawiranegara, dan K.H. Abdul Fatah Hasan.

Munculnya K.H. Syam’un sebagai tokoh sejarah paling banyak dibahas dalam pembelajaran sejarah lokal di Banten menarik dikaji karena hal ini menjadi temuan paling menarik. Mengenai hal ini, peneliti melakukan

wawancara dengan Ganda Yanuar, guru SMA Negeri 6 Kota Serang. Ia menjelaskan tiga alasan. Pertama, karena momentum penetapan K.H. Syam'un sebagai pahlawan nasional tahun 2018 masih hangat sehingga perlu disosialisasikan; kedua, karena aspek kontemporer atau kekininian; ketiga, karena tokoh-tokoh masa kesultanan lebih banyak pilihan dan beragam dibandingkan tokoh masa kemerdekaan yang relatif sedikit. Alasan yang berbeda disampaikan oleh Hendriana Warman, guru SMA Negeri 1 Rangkasbitung, Lebak. Ia mengatakan kemungkinan besar karena berlatarbelakang organisasi yang besar di Banten yaitu organisasi massa Islam dan lembaga pendidikan Islam Al-Khairiyah, terutama di wilayah Serang dan Cilegon.

Kendala Pembelajaran

Dalam pelaksanaan pembelajaran, kendala yang dihadapi para guru sejarah adalah minimnya bahan ajar sejarah lokal (69,45%), minimnya media pembelajaran sejarah lokal (42,4%), dan minimnya alokasi waktu untuk pembelajaran sejarah lokal (29,2%). Hanya lima orang responden yang mengatakan tidak ada kendala apapun. Terkait kendala ini, hampir seluruh responden menyatakan perlunya dibuat bahan ajar dan media pembelajaran sejarah lokal. Selama ini sumber materi sejarah lokal diserahkan kepada guru-

guru sejarah dengan cara mencarinya dari berbagai sumber literatur termasuk internet. Tidak menutup kemungkinan akan diperoleh informasi sejarah yang tidak otentik atau keliru. Untuk itulah maka pembuatan bahan ajar yang dibakukan dalam sebuah modul oleh pemerintah daerah sangat penting dilakukan.

Dari hasil wawancara, Hendriana Warman menyatakan bahwa kebutuhan utama guru-guru sejarah dalam pembelajaran sejarah lokal adalah literasi untuk bahan ajar dan media pembelajaran. Khusus untuk di wilayah Banten selatan yang masih minim narasi sejarah, ia mengusulkan agar pemerintah daerah menganggarkan pembiayaan untuk penelitian sejarah dan tokoh-tokoh lokal yang berpengaruh dalam sejarah. Tidak hanya sebatas laporan hasil penelitian yang disimpan di kantor pemerintahan, tetapi harus bisa dibukukan untuk didiskusikan para guru sejarah dan diajarkan di ruang-ruang kelas.

Sebagai solusi terhadap kendala yang dihadapi, guru-guru sejarah menghendaki agar sejarah lokal diusulkan menjadi muatan lokal Provinsi Banten. Regulasi muatan lokal yang dimaksud para responden ada dalam Permendikbud No. 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013. Dalam peraturan ini, muatan lokal diartikan sebagai bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses

pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya. Dalam pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa muatan lokal dapat diintegrasikan pada mata pelajaran seni budaya; prakarya; Pendidikan, Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK); dan bahasa dan/atau teknologi.

Dalam hal pengintegrasian sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dilakukan, maka Pasal 4 ayat 4 Permendikbud tersebut menerangkan bahwa muatan pembelajaran terkait muatan lokal dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri dimana sekolah dapat menambah beban belajar muatan lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu. Selanjutnya, pemerintah daerah yang menetapkan muatan lokal untuk diberlakukan di wilayahnya. Sebenarnya saat ini telah ada Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Bagi Pendidikan Menengah Se-Provinsi Banten, namun sayangnya sejarah lokal Banten belum masuk ke dalam peraturan tersebut.

Terkait dengan muatan lokal, Ganda Yanuar mengatakan bahwa guru-guru sejarah melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Asosiasi Guru Sejarah Indoensia (AGSI) Provinsi Banten selalu konsisten

dalam perjuangan untuk mendorong terbitnya regulasi pembelajaran sejarah lokal baik berbentuk peraturan gubernur atau yang lebih ideal berupa peraturan daerah. Produk hukum ini menurutnya penting karena akan menguatkan posisi tawar guru sejarah dan efek yang lebih besar nantinya untuk daerah yaitu pembentukan karakter siswa yang didukung kearifan lokal daerah. Pendapat serupa juga pernah ditemukan dalam kajian sejarah lokal yang dilakukan oleh Romadi dan Kurniawan (2017) dan Sutarman (2020).

Perlunya Dukungan Peraturan Gubernur

Sebagai solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi di atas, maka para responden menghendaki agar sejarah lokal diusulkan menjadi tambahan muatan lokal di Provinsi Banten. Saat ini telah ada dua Peraturan Gubernur (Pergub) Banten yang mengatur tentang muatan lokal. Pertama adalah Pergub Banten Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Seni Budaya Bagi Pendidikan Menengah Se-Provinsi Banten serta Pergub Banten Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Seni Pencak Silat bagi Pendidikan Khusus Se-Provinsi Banten. Kedua peraturan gubernur tersebut belum mengatur muatan lokal lainnya yang diatur

dalam Permendikbud 79/2014, apalagi tentang muatan sejarah lokal.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab Pendahuluan, ketentuan mengenai muatan lokal telah diatur oleh Permendikbud No 79 tahun 2014, di mana menurut pasal 7 peraturan ini, muatan lokal ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Dalam peraturan ini, penambahan muatan lokal dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan daerah tempat tinggalnya.

Memang sayangnya, dalam Permendikbud tersebut dinyatakan bahwa muatan lokal dapat diintegrasikan pada mata pelajaran Seni Budaya; Prakarya; Pendidikan, Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK); Bahasa dan/atau Teknologi. Artinya, sejarah lokal tidak menjadi bagian yang diatur di dalam Permendikbud tersebut. Hal ini adalah sesuatu yang patut disayangkan, karena sejarah merupakan cerita faktual atas perjalanan dan jati diri bangsa yang tentunya sangat penting dipahami oleh generasi mudanya.

Jika teknologi lokal saja dapat dipelajari dan dimasukkan menjadi muatan lokal, maka sudah selayaknya tempat-tempat bersejarah seperti lokasi pertempuran penting, lokasi perundingan penting, lokasi ditemukannya candi, tempat lahir dan tempat berjuang para tokoh nasional dan pahlawan nasional dari

daerah masing-masing, tentu lebih layak untuk diketahui generasi muda.

Sebenarnya muatan sejarah lokal pernah diakomodasi di dalam beberapa buku mata pelajaran sejarah seperti di Kalimantan Barat (Utama, 2013) dan Banyuwangi (Sholeh, 2011). Bahkan muatan lokal sejarah juga pernah masuk ke dalam beberapa peraturan pemerintah daerah, seperti Peraturan Walikota Bekasi No. 68 Tahun 2013 tentang Penerapan Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Bekasi untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 22 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal. Sayangnya, peraturan-peraturan daerah tersebut berlaku sebelum terbitnya Permendikbud No. 79 Tahun 2014.

Setelah Permendikbud 79/2014 terbit, muatan sejarah lokal tetap saja disisipkan oleh beberapa sekolah pada mata pelajaran sejarah di beberapa daerah, di antaranya di Kalimantan Selatan (Abbas, 2020), Temanggung (Nugraheni, 2020), dan Cilegon (Permana, 2019). Belum lagi dari penelitian ini sendiri diperoleh informasi bahwa 73% responden guru sejarah telah menyisipkan sejarah lokal Banten pada mata pelajaran sejarah.

Pasca Permendikbud 79/2014, kajian-kajian yang mendukung akan pentingnya muatan lokal sejarah agar masuk ke dalam

kurikulum terus dilakukan para akademisi, di antaranya oleh Sutarman (2020) dan Wijayanti (2017). Kedua penelitian itu menyajikan argumen-argumen yang kuat akan pentingnya muatan sejarah lokal untuk masuk ke dalam kurikulum. Bahkan di Jawa Barat, komitmen Bupati Bandung untuk memasukkan sejarah lokal pada kurikulum sangat kuat, namun karena ditetapkannya Kurikulum 2013, komitmen ini malah tidak terwujud Sutarman (2020). Mungkin saja hal itu terhambat oleh Permendikbud 79/2014 yang tidak mencantumkan sejarah lokal sebagai bagian dari muatan lokal.

Dengan kasus di atas, bisa jadi keinginan seluruh pemerintah daerah untuk memasukkan muatan sejarah lokal ke dalam peraturan daerah terkendala oleh hal yang sama, yaitu Permendikbud 79/2014. Hal ini tentu membutuhkan kajian akademis dan dukungan semua pihak agar Permendikbud tersebut direvisi.

Sekarang pertanyaannya, sebelum Permendikbud tersebut berhasil direvisi, apakah mungkin pemerintah daerah tetap dapat memasukkan sejarah lokal menjadi muatan lokal? Apakah mungkin muatan sejarah lokal tetap masuk ke dalam peraturan pemerintah daerah dengan pertimbangan tertentu?

Kami berpendapat bahwa sebagai langkah progresif dari daerah, hal itu bisa saja

dilakukan. Beberapa alasan yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut: Pertama, penambahan sejarah lokal ke dalam muatan materi pendidikan lokal secara substantif tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional, baik menurut UUD 1945 maupun UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahkan langkah itu justru mendukung tujuan pendidikan nasional. Kedua, menurut Permendikbud 79/2014 itu sendiri, tujuan dari diizinkan daerah menambahkan muatan lokal adalah agar peserta didik mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerahnya (Pasal 2 ayat 2a), dan peserta didik melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya (ayat 2b). Maka menambahkan muatan sejarah lokal pada pelajaran sejarah tentu sangat relevan dan sejalan dengan kedua tujuan di atas.

Pendapat ini memang pendapat yang progresif secara hukum, yang mungkin masih dapat diperdebatkan. Namun, ternyata ada sebuah daerah di Indonesia yang melakukan langkah progresif ini dengan memasukkan muatan sejarah lokal pada peraturan daerahnya. Daerah tersebut adalah Provinsi Gorontalo.

Pada Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 7 Tahun 2015 tentang

Kurikulum Muatan Lokal, pada pasal 6 dijelaskan bahwa Kurikulum Muatan Lokal di Daerah meliputi bidang: bahasa dan sastra daerah, kesenian daerah, lingkungan alam/ekosistem, adat istiadat daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, rekayasa, *sejarah lokal*, masakan tradisional, busana tradisional, dan/atau nilai budaya lokal dalam perspektif global. Pada Peraturan Daerah (Perda) ini jelas-jelas sejarah lokal ditetapkan menjadi muatan lokal yang tentu hal ini menggembirakan para guru-guru dan aktivis sejarah lokal.

Mengingat Perda ini ditetapkan pada tahun 2015, yaitu setahun setelah Permendikbud 79/2014 terbit, mungkin saja ada yang mengira bahwa Permendikbud tersebut belum sempat dikaji dan tidak dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam Perda tersebut. Namun sayang sekali dugaan di atas keliru, karena Permendikbud 79/2014 bahkan menjadi salah satu konsideran (urutan ke-12) dalam Perda tersebut.

Dengan kasus yang menarik itu, tentunya Perda Provinsi Gorontalo dapat dijadikan bahan kajian oleh para akademisi dan ahli hukum di Provinsi Banten agar menambahkan muatan sejarah lokal pada Peraturan Gubernur Banten. Penambahan muatan sejarah lokal pada Peraturan Gubernur Banten akan sangat bermanfaat bagi pelestarian dan

pengembangan sejarah lokal di Provinsi Banten dan dapat mendukung upaya Gubernur Banten yang tengah merevitalisasi lokasi-lokasi sejarah di Provinsi Banten, termasuk Mesjid Agung Banten.

Terkait dengan muatan lokal, salah seorang responden penelitian ini, Ganda Yanuar, mengatakan bahwa guru-guru sejarah melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Asosiasi Guru Sejarah Indoensia (AGSI) Provinsi Banten selalu konsisten dalam perjuangan untuk mendorong terbitnya regulasi pembelajaran sejarah lokal baik berbentuk peraturan gubernur atau yang lebih ideal berupa peraturan daerah. Produk hukum ini menurutnya penting karena akan menguatkan posisi tawar guru sejarah dan efek yang lebih besar nantinya untuk daerah yaitu pembentukan karakter siswa yang didukung kearifan lokal daerah. Pendapat serupa juga pernah ditemukan dalam kajian sejarah lokal yang dilakukan oleh Romadi dan Kurniawan (2017) dan Sutarman (2020).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa sejarah lokal Banten telah diimplementasikan oleh sebagian besar guru sejarah SMA di Banten. Meskipun demikian, para guru sejarah masih menghadapi kendala

terkait minimnya sarana pendukung pembelajaran seperti bahan ajar yang otentik, media pembelajaran yang variatif dan penyeragaman konten materi antar sekolah. Selama ini responden berimprovisasi dengan berbagai sumber yang terbatas dan belum tervalidasi oleh para ahli.

Materi sejarah lokal Banten yang diajarkan pada adalah hampir seluruh periodisasi sejarah, mulai dari masa pra-aksara hingga masa kemerdekaan. Hal ini membuktikan bahwa cakupan sejarah lokal Banten tidak hanya didominasi oleh materi sejarah Kesultanan Banten semata. Selain materi peristiwa, guru-guru sejarah juga sudah mengenalkan sejumlah tokoh pejuang lokal Banten pada siswa untuk dapat dipelajari dan diteladani pada masa kini.

Rekomendasi

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Banten untuk merevisi Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Bagi Pendidikan Menengah Se-Provinsi Banten. Revisi peraturan ini diharapkan dapat mendukung implementasi pembelajaran sejarah lokal Banten sehingga dapat diterapkan secara formal-legal di seluruh SMA di Provinsi Banten.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, N. F. (2020). Pembelajaran Sejarah Lokal di Sekolah Pedesaan dan Vokasi. *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, 3(1), 88–99.
- Amin, S. (2010). *Pewarisan nilai sejarah lokal melalui pembelajaran sejarah jalur formal dan informal pada siswa sma di Kudus Kulon*. Tesis. Pascasarjana Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. (2019). *Ragam Pusaka Budaya Banten*. Serang.
- Fauzan, R. (2018). Implementasi Materi Sejarah Lokal gerakan Sosial Messianistik dan Nativistisme di Banten melalui Pendekatan Sainstifik. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 1(2), 25–34.
- Hardi, Etmi & Basri, W. (2019). Implementasi Pembelajaran Sejarah Bermuatan Lokal di SMA Negeri di Sumatera Barat. *Prosiding Seminar Nasional Sejarah Ke-4 Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang*, 208–215.
- Hardiana, Y. (2017). Pembelajaran Sejarah Indonesia Berbasis Peristiwa-peristiwa Lokal di Tasikmalaya untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 1(1), 41–46.
- Hatmono, P.D. (2021). Historiografi Buku Teks Sejarah Lokal Pada Pembelajaran Sejarah. *Sabbhata Yatra: Jurnal Pariwisata dan Budaya*, 2(1), 60–74.
- Jumardi, H.N., Qodariah, Lelly & Absor, N.F. (2020). Suplemen Materi Ajar Mata Pelajaran Sejarah Indonesia Kelas X SMA Berdasarkan Sumber Sejarah Lokal Banten. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 29(2) 157–169.

- Lestari, S.U., Saraswati, Ufi, & Muntholib, A. (2018). Penanaman Nilai-nilai Nasionalisme dalam Pembelajaran Sejarah Lokal Perjuangan Rakyat Sukorejo Kelas XI di SMA Negeri 1 Sukorejo. *Indonesian Journal of History Education*, 6(2), 205–215.
- Miles, M.B. & Huberman, AM. (1992). *Analisis Data Kuantitatif, Metoda-Metoda Baru*, (Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI Press.
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Seni Budaya Banten Bagi Pendidikan Menengah Se-Provinsi Banten.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013.
- Permana, R. & Suhaili, A. (2020). Implementasi Pembelajaran Sejarah Peminatan Berbasis Nilai Kearifan Lokal Topi Bambu Tangerang. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 3(2), 197–202.
- Permana, R. (2019). Implementasi Pembelajaran Sejarah Berbasis Sumber Sejarah Al-Khairiyah Pada Muatan Lokal (Studi di Madrasah Aliyah dan SMK-IT Al-Khairiyah Citangkil Cilegon). *Alur Sejarah: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 3(1). 1–10.
- Purnamasari, I & Wasino. (2011). Pengembangan Model Pembelajaran Sejarah Berbasis Situs Sejarah Lokal di SMA Negeri Kabupaten Temanggung. Paramita: *Historical Studies Journal*, 21(2), 202–212.
- Romadi & Kurniawan, G.B. (2017). Pembelajaran Sejarah Lokal Berbasis Folklore Untuk Menanamkan Nilai Kearifan Lokal Kepada Siswa. Sejarah dan Budaya; *Jurnal Sejarah, budaya dan Pengajarannya*, 11(1), 79–94.
- Siska, Y. (2015). Analisis Kebutuhan Bahan Ajar Sejarah Lokal Lampung untuk Sekolah Dasar. *Mimbar Sekolah Dasar*, 2(2), 199–211.
- Somad, A. (2019). Pembelajaran Sejarah Lokal di Banten: Implementasi dan Upaya Pengintegrasian Dalam Pembelajaran Sejarah Kurikulum 2013. Makalah. Disampaikan dalam Bedah Buku Aria Wangsakara yang diselenggarakan AGSI Provinsi Banten di Kampus Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, 26 November 2019.
- Sirnayatin, T.S. (2017). Membangun Karakter Bangsa Melalui Pembelajaran Sejarah. *SAP: Susunan Artikel Pendidikan*, 1(3), 312–321.
- Susanto, H. (2014). Seputar Pembelajaran Sejarah (Isu, Gagasan dan Strategi Pembelajaran) (Isu, Gagasan dan Strategi Pembelajaran). Aswaja Pressindo, Yogyakarta. 128p.
- Sutarman, U. (2020). *Pembelajaran Muatan Lokal Sejarah Lokal Kabupaten Bandung*. Disertasi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Tati, A.D.R. (2016). Analisis Kebutuhan Bahan Ajar Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Kabupaten Bone di Sekolah Dasar. *Istoria: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 12(1), 73–86.
- Wibowo, A.M. (2016). Pengembangan Model Pembelajaran Sejarah Lokal Di SMA Kota Madiun. *Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 6(1) 46–57.

Wijayanti, Y. (2017). Peranan Penting Sejarah Lokal Dalam Kurikulum di Sekolah Menengah. *Jurnal Artefak*, 4(1), 53–60.